

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus , 2013, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2012, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN /APBD, BPKP*, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2013, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta.
- Djaja, Ermansyah , 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Tolib , 2015, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Effendy, Marwan , 2012, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- H.Loewy, Arnold , 2013, *Criminal Law In A Nutshell*, Fifth Edition, West, A Thomson Reuters Business.
- Hamzah, Andi , 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hartini, Evi , 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, 2011 , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, *Memahami untuk Membasmi*, KPK, Jakarta.
- Kusumah, M.W., 2011, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Marpaung, Leden, 2010, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- Mulyadi, Lilik , 2011, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Alike, Semarang.
- Nawawi, Hadari, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ngani, Nico , 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisi, Yogyakarta.
- O.S Hiariej, Eddy, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- P.Huntington, Samuel , 2011, *Modernisasi dan Korupsi*, Bhartara Karya Aksara.
- Prakoso, Djoko, 2010, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh , 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono , 2010 , *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur,Bandung.

- Purnomo, Bambang , 2011, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Marta Buku, Yogyakarta.
- Samosir, Djisman, 2013, *Segenggam tetang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sasangka, Hari , 2013, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya.
- Sianturi, S.R. , 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, Nikolas, 2012, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Soekanto, Soejono , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sofyan, Andi , 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media, Bandung.
- Sudarto, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Surachmin, et al., 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi* , Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsudin, Aziz , 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudi, Kristina , 2010, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4250)

Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002  
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4168)

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan  
Bantuan Sosial

Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri  
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan  
Bantuan Sosial

Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri  
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan  
Bantuan Sosial

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata  
Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Jaksa Agung No. PERJA/039/A/JA/10/2010 tentang tata kelola  
administrasi dan teknis penghentian penyidikan perkara tindak  
pidana khusus.

### C. Hasil Penelitian

Aria Juliatman Syamsir, 2012. Koordinasi Kewenangan Penyidik dalam  
Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Tesis* Fakultas  
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tia Rosana Ratna Sari, 2016. Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan  
Korupsi dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian  
Penyidikan dan Penuntutan dalam Menangani Tindak Pidana  
Korupsi. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta.

Yusuf Benny Situmorang, 2016, Penetapan Status Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Perlindungan Hak Asasi Manusia , *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### D. Jurnal

Johana Olivia Rumajar, 2014, *Alasan Penghentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi Lex Crimen Vol.III No.4, Sulawesi Utara.

S. Gareda, Markhy, 2015, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Crimen Vol.IV No.1, Sulawesi Utara.

#### E. Internet

Sub bagian Hukum BPK, Pemberian Bantuan Hibah oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, [http://samarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan\\_Hukum\\_2014\\_Hibah\\_APBD.pdf](http://samarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan_Hukum_2014_Hibah_APBD.pdf). Diakses pada tanggal 14 November 2017, pukul 10.59 WIB.

Bagus Kurniawan, 2015, Kejati DIY Keluarkan SP3 Kasus Dugaan Korupsi Mantan Bupati Bantul, <https://news.detik.com/berita/d-2983391/kejati-diy-keluarkan-sp3-kasus-dugaan-korupsi-mantan-bupati-bantul> , diakses pada tanggal 14 November 2017 pukul. 13.42 WIB.

Dzikri Ramadhan, 2016, Dampak Masif Korupsi, [https://www.kompasiana.com/dzikriramadhan/dampak-masif-korupsi\\_581edb5609b0bd514f471e73](https://www.kompasiana.com/dzikriramadhan/dampak-masif-korupsi_581edb5609b0bd514f471e73) ,diakses pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 19.19 WIB.